Katalog: 4102002.1611

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN EMPAT LAWANG

2022

Badan Pusat Statistik
Kabupaten Empat Lawang

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN EMPAT LAWANG

2022

https://empatlawangkab.bps.go.id

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN EMPAT LAWANG 2022

Nomor Publikasi : 16110.2216

Katalog BPS : 4102002.1611

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah halaman : xii + 71

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang

Diterbitkan oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang

Dicetak oleh :
-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

https://empatlawangkab.bps.go.id

TIM PENYUSUN

Pengarah
Windy Prabowo Setyawan, S.Si., MA.

Editor
Asep Aliwardani, SST., M.Si

Penulis
Asep Aliwardani, SST., M.Si

Penyiapan Draft
Wisnu Adi Kusuma, S.Tr.Stat.

Desain *Cover*
Wisnu Adi Kusuma, S.Tr.Stat.

https://lempatlawangkab.bps.go.id

https://empatlawangkab.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya publikasi **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022.** Publikasi ini memuat hasil pembangunan manusia Kabupaten Empat Lawang, yang mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut terangkum dalam satu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Publikasi IPM ini menyajikan data runtun waktu mengenai pembangunan manusia di Kabupaten Empat Lawang. Publikasi ini juga diperkaya dengan analisis singkat dan padat, mengenai IPM serta hubungannya dengan variabel pendukung IPM.

Ucapan terima kasih disampaikan pada semua pihak yang telah berperan dalam membantu menyusun publikasi ini, sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tebing Tinggi, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Empat Lawang

Windy Prabowo Setyawan, S.Si., MA.

https://empatlawangkab.bps.go.id

https://empatlawangkab.bps.go.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v
Daftar Isi vii
Daftar Tabel ix
Daftar Gambar xi

Bab I. Pendahuluan 1
Latar Belakang 3
Kerangka Konseptual Pembangunan Manusia 5
Pembangunan Manusia bagian dari SDG's 7
Pembangunan Manusia dalam Program Nawacita 11
Arah Penulisan 13
Tujuan Penulisan 14
Sistematika Penulisan 14

Bab II. Perubahan Metodologi 17
Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM 19
Alasan Perubahan Metodologi 22
Cakupan Perubahan Metodologi 23
Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia 25

Bab III. Metodologi Baru IPM 29
Pengertian IPM 31
Dimensi Umur Panjang dan Sehat 33
Dimensi Pengetahuan 34
Harapan Lama Sekolah 35
Rata-rata Lama Sekolah 35
Indeks Pengetahuan 37
Dimensi Standar Hidup Layak 38
Penyusunan IPM Metode Baru 39
Pencapaian dan Status Pembangunan Manusia 41

https://empatlawang.bps.go.id

Bab IV.	Hasil-Hasil IPM	43
	Capaian Meningkat, Status Pembangunan Manusia Tetap	47
	Hidup Semakin Sehat dan Lebih Lama.....	50
	Kualitas Pendidikan Meningkat, Peluang Terbuka Luas....	52
	Standar Hidup Layak Semakin Meningkat	55
	Capaian Pembanguan Manusia Kabupaten Empat Lawang Di Tengah Kabupaten/Kota Lainnya	57
Bab V.	Kesimpulan	63
Lampiran		67

https://empatlawangkab.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Indikator IPM Metode Baru dan Lama UNDP	24
Tabel 2.2	Perbedaan Indikator IPM Metode Baru dan Lama BPS	27
Tabel 3.1	Konversi Tahun Untuk Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	36
Tabel 3.2	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Metode Baru	40
Tabel 3.3	Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	42
Tabel 4.1	Peringkat Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Sumsel, 2017-2022	49
Tabel 4.2	Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Empat Lawang, 2021 (persen)	52
Tabel 4.3	IPM Kota di Sumsel menurut Komponen, 2022	58
Tabel 4.4	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Empat Lawang, 2019 – 2021	60

https://empatlawangkab.bps.go.id

https://empatlawangkab.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM oleh UNDP	20
Gambar 3.1	Diagram Penghitungan Metode Baru Indonesia ...	32
Gambar 4.1	Nilai dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Empat Lawang, 2017 - 2022	47
Gambar 4.2	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Empat Lawang, 2017-2022	50
Gambar 4.3	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Empat Lawang, 2017 - 2022	54
Gambar 4.4	Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan Penduduk Kabupaten Empat Lawang, 2017 – 2021	56
Gambar 4.5	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan Masyarakat (Teori Derajat Kesehatan Hendrik L. Blum)	61

https://empatlawangkab.bps.go.id

https://empatlawangkab.bps.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

https://empatlawangkab.bps.go.id

https://empatlawangkab.bps.go.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan tahap awal di banyak negara, umumnya ditekankan pada peningkatan produksi. Oleh karena itu strategi pembangunan yang paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam strategi ini hanyalah sebagai instrumen atau salah satu faktor produksi saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Namun saat ini telah terjadi perubahan paradigma dari pembangunan berorientasi pada produksi berubah menjadi pembangunan yang berorientasi pada manusia (*Human Centre Development*).

Perubahan paradigma ini juga telah terjadi di Indonesia. Dalam paradigma ini pembangunan Nasional ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli) serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan), sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan dengan sendirinya meningkat.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Penduduk Sebagai sumber daya dari berbagai aspek tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Bagi sebagian penduduk lima jenis kebutuhan pokok ini, bukan saja masih kurang terpenuhi, bahkan menjadi sesuatu sangat diperlukan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.

Aspek pemenuhan pangan, seain jumlahnya saja yang harus mendapat perhatian, tapi juga akses untuk memperoleh pangan haruslah dipelihara. Sehingga kebutuhan setiap penduduk akan pangan yang layak untuk dikonsumsi menjadi lebih terjamin. Kebutuhan akan sandang, selain masalah memenuhi kebutuhan akan kertututpan aurat juga etika kesopanan terermin dari pemeliharaan dalam kebudayaan dan peradaban manusia.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Perumahan menjadi masalah bukan saja terkait dengan jumlah penduduk namun menyangkut juga ketersediaan tanah, sumber air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, dan kemudahan akses pendidikan serta angkutan umum. Fasilitas kesehatan dan kemudahan akses pendidikan ini juga merupakan elemen utama dalam pengembangan sumber daya manusia pada masyarakat yang bersangkutan.

Peningkatan taraf hidup, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta perbaikan dalam hal distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat di suatu daerah, akan berakibat pada membaiknya kondisi sumber daya manusia di daerah tersebut.

Untuk itu diperlukan suatu model dan strategi pembangunan yang tepat, yang dapat menyentuh keseluruhan aspek dari peningkatan taraf hidup dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pendapatan, baik antara kelompok masyarakat maupun antar daerah.

Kerangka Konseptual Pembangunan Manusia

Perdebatan tentang indikator pembangunan sosial-ekonomi sudah sejak lama terjadi. Pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan telah digugat oleh kalangan ekonomi maupun non-ekonomi yang melihat ketidakakuratan indikator tersebut, yang kemudian memunculkan beberapa indikator baru. Indikator baru secara umum berfokus pada pembangunan manusia. Morris (1979) membangun the Physical Quality of Life Index (PQLI), sedangkan United Nation Development Program (UNDP) membangun Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini banyak digunakan oleh negara negara di dunia dengan landasan yang dibangun oleh Haq (1996). Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui Human Development Report tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai "*a process of enlarging people's choices*" atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas

https://empatlawang.bps.go.id

(productivity), pemerataan (equity), keberlanjutan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment).

Berdasarkan paradigma pembangunan manusia, tujuan utama pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia. Pengertian ini mempunyai dua sisi. *Pertama,* pembentukan kemampuan manusia seperti tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang meningkat. *Kedua,* penggunaan kemampuan yang telah dimilikinya untuk bekerja, menikmati kehidupan atau aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan, sosial dan politik.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Paradigma pembangunan manusia ini yang disebut sebagai konsep holistik, yang mempunyai 4 (empat) unsur penting, yaitu : Unsur pertama, produktivitas. Proses masyarakat berpartisipasi penuh untuk memperoleh penghasilan dan pekerjaan merupakan unsur produktivitas.

Unsur kedua, ekuitas. Kesempatan yang harus adil bagi masyarakat dalam memperoleh akses. Agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dari setiap kesempatan yang ada, maka harus dihapuskan semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik.

Unsur ketiga, kesinambungan. Generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan. Segala bentuk permodalan, baik modal fisik dan manusia maupun lingkungan hidup, harus dilengkapi agar tercapai kesinambungan.

Unsur keempat, pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Pengambilan keputusan dan dalam proses-proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat merupakan hak penuh bagi masyarakat. Masyarakat sebagai agen pembangunan yang berkualitas harus terus meningkatkan kemampuan agar kreatifitas dan produktifitas manusia akan terus meningkat.

Konsep pembangunan manusia ini diprakarsai dan ditunjang oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) , dengan mengembangkan *Human Development Index* (HDI). HDI ini merupakan indikator komposit yang terdiri dari 3 ukuran, yaitu kesehatan (sebagai ukuran *longevity),* pendidikan (sebagai ukuran *knowledge)* dan tingkat pendapatan riil (sebagai ukuran *living standards).*

https://empatlawangkab.bps.go.id

Pembangunan manusia bagian dari agenda SDGs

Ketermajinalan perempuan, etnis minoritas, dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil menghambat kemajuan pembangunan manusia. Hal ini telah menyebabkan kesenjangan yang signifikan dan menyebabkan banyak ketertinggalan di dunia, termasuk di Indonesia dan kawasan Asia dan Pasifik. Selain itu, kelompok yang termarjinalisasi sering memiliki kesempatan terbatas untuk mempengaruhi kebijakan yang menentukan hidup mereka.

Saat ini terlalu berfokus pada ukuran pada rata-rata nasional, yang sering menutupi variasi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat,"Suatu pembangunan Untuk maju kyang berkualitas perlu

meneliti lebih dekat bukan hanya apa yang telah dicapai, tetapi juga dilihat siapa dan mengapa terjadi ketertinggalan.

Kemajuan belum memberi manfaat bagi semua orang dan kesenjangan berdampak pada kelompok tertentu secara tidak proporsional. Terutama perempuan, etnis minoritas dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dapat mengalami deprivasi secara terbuka dan tersembunyi. Di Indonesia, meskipun terjadi penurunan kemiskinan secara tajam dalam dua dekade terakhir, 140 juta warga masih hidup dengan kurang dari Rp. 20.000 per hari.

Agar negara-negara mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan tidak ada seorangpun yang tertinggal, perlu perhatian yang lebih besar untuk memberdayakan yang paling termarjinalisasi dalam masyarakat dan mengakui pentingnya memberi mereka suara yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan tersebut penting untuk memutus siklus eksklusi dan deprivasi juga menyerukan pergeseran ke arah penilaian kemajuan dalam bidang-bidang seperti partisipasi dan otonomi.

Dengan menghilangkan norma-norma sosial dan hukum yang diskriminatif, dan mengatasi akses yang tidak setara terhadap partisipasi politik yang telah menghambat kemajuan begitu banyak orang, kemiskinan bisa diberantas dan pembangunan yang damai, adil dan berkelanjutan dapat dicapai untuk semua orang, merupakan bagian dari agenda Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

https://empatlawangkab.bps.go.id

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs, *the 2030 Agenda for Sustainable Development*) adalah kesepakatan yang mendorong terjadinya perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

SDGs disahkan dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yang akan membingkai setiap agenda dan kebijakan politik negara-negara anggota PBB selama 15 tahun ke depan. SDGs berlandaskan prinsip-prinsip universalitas, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No one is Left Behind".*

SDGs terdiri dari 17 tujuan (*goals*) yang terbagi menjadi 169 target dan sekitar 300 indikator. Target yang berkaitan erat dengan pembangunan manusia tercermin dalam 3 (tiga) tujuan program SDGs. Oleh karena itu, tujuan dan target pembangunan manusia terus diupayakan peningkatannya melalui pencapaian target SDGs.

Ketiga tujuan SDGs tersebut masing-masing adalah *tujuan ketiga, tujuan keempat,* dan *tujuan kedelapan*. Dengan tujuan ketiga, yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Target yang berkaitan dengan pembangunan manusia adalah target 3A, yang bertujuan untuk mengakhiri kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun.

Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentuk IPM, angka harapan hidup saat lahir secara tidak langsung akan menjadi salah

https://empatlawangkab.bps.go.id

satu indikator dari SDGs. Secara tidak langsung pula, angka harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator SDGs, yaitu angka kematian neonatal ditekan guna mencapai target tersebut.

Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4B, dinyatakan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki harus dipastikan memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang setara, perawatan, dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar.

Pada target 4B ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA ditingkatkan. Secara langsung, ketika target tersebut dicapai maka angka rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat.

Sementara tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam tujuan kedelapan, terdapat target 8A yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) minimal 7 persen per tahun di negara-negara berkembang. Salah satu indikator dari target ini adalah meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dengan meningkatnya PNB per kapita, secara tidak langsung akan menaikkan pengeluaran per kapita.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Pembangunan Manusia dalam Program Nawa Cita Pemerintah

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mempunyai visi misi yang tertuang dalam Sembilan agenda prioritas Nawa Cita. Sembilan agenda ini merupakan upaya untuk melanjutkan semangat dan cita-cita Bung Karno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sembilan agenda prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Agenda pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Agenda kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Agenda ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Agenda keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Agenda kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar", serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera", dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Agenda keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Agenda ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.

Agenda kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

https://lenpatlawangkab.bps.go.id

Agenda kesembilan, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Kesembilan agenda prioritas tersebut selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama, yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*.

Pembangunan manusia sendiri menjadi salah satu dari tiga dimensi pembangunan. Dimensi tersebut adalah dimensi pembangunan manusia, dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.

https://empulauanrukab.bps.go.id

Arah Penulisan

Permasalahan-permasalahan pelik seperti kemiskinan dan pengangguran, serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, merupakan permasalahan mendasar di masyarakat. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar mengatasi permasalahan masyarakat tersebut.

Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat, namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah.

UNDP (1991), memperkenalkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini mengukur pencapaian dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yang terdiri atas umur panjang dan sehat (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*decent living standard*).

IPM menjadi indikator yang penting dan populer, sehingga diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Oleh UNDP, pencapaian pembangunan manusia setiap negara, setiap tahun dilaporkan secara rutin dalam bentuk *Human Development Report* (HDR). Dalam kerangka inilah, publikasi Karakteristik Pembangunan Manusia Kabupaten Empat Lawang 2019 disusun.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Tujuan Penulisan

Publikasi Karakteristik Pembangunan Manusia Kabupaten Empat Lawang 2019 ini disusun dalam rangka untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia, yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sistematika Penulisan

Publikasi Karakteristik Pembangunan Manusia Kabupaten Empat Lawang 2019 terdiri dari 5 (lima) bab. Pada Bab I, menyajikan

pendahuluan yang menguraikan secara rinci latar belakang, studi literatur berupa perkembangan paradigma pembangunan dan kerangka konseptual pembangunan manusia. Selain itu, juga dibahas arah, tujuan, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II menjelaskan perubahan metodologi IPM dari aspek sejarah penghitungan, alasan perubahan metodologi, cakupan perubahan, dampak perubahan metodologi, dan implementasi IPM Metode Baru di Indonesa.

Metodologi baru penghitungan IPM, yang berisi uraian tentang metode penghitungan masing-masing komponen sampai terbentuknya IPM Metode Baru dijelaskan pada Bab III

Pada Bab IV disajikan hasil-hasil IPM Kabupaten Empat Lawang, yang meliputi status pembangunan manusia dan capaian menurut dimensi, serta disparitasnya.

Adapun Bab V, adalah kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan publikasi ini.

https://empatlawangkab.bps.go.id

https://empatlawangkab.bps.go.id

BAB II

PERUBAHAN METODOLOGI

https://empatlawangkab.bps.go.id

https://empatlawangkab.bps.go.id

PERUBAHAN METODOLOGI

Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM

IPM terus mendapat sorotan, sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP. Metodolgi dan indicator yang dihasilkan selain banyak dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit juga muncul kritikan. Sebagian pihak yang mengkritik berpendapat, bahwa indikator yang tercakup dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Kritikan itu dijawab oleh para pakar, dengan terus melakukan sosialisasi mengenai kelebihan-kelebihan IPM.

https://kematlawangkab.bps.go.id

UNDP melakukan dua kali penyempurnaan, yaitu pada tahun 1991 dan 1995, untuk menyempurnakan indikator-indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Selanjutnya tahun 2010 melakukan perubahan metodologi penghitungan IPM.

Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia, mereka menyebutnya sebagai *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini, kemudian secara rutin setiap tahun dipublikasikan dalam *Human Development Report* (HDR) atau Laporan Pembangunan Manusia.

IPM tahun 1990, dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diproksi dengan angka harapan hidup saat

lahir, dimensi pengetahuan menggunakan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak dengan PDB per kapita. Untuk merangkai ketiga dimensi itu hingga menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM oleh UNDP

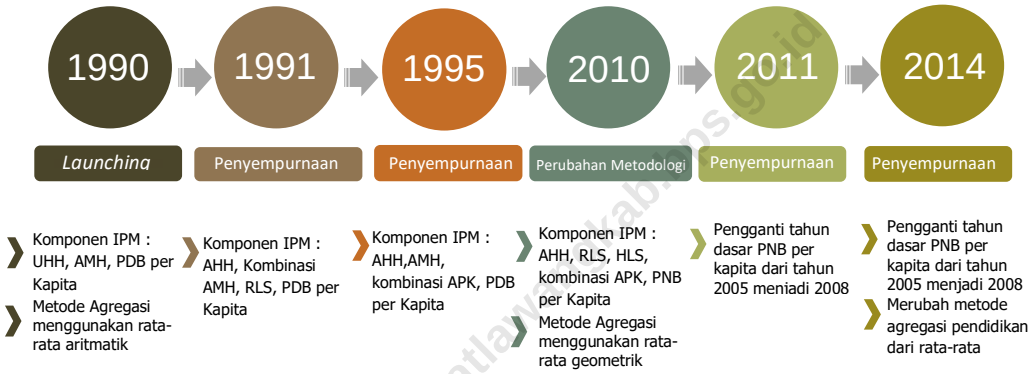

https://empatlawangkab.bps.go.id

Catatan:

AHH	: Angka Harapan Hidup saat Lahir
APK	: Angka Partisipasi Kasar
AMH	: Angka Melek Huruf
HLS	: Harapan Lama Sekolah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
PNB	: Pendapatan Nasional Bruto
PDB	: Produk Domestik Bruto

Pada Tahun 1991, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dalam dimensi pengetahuan dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah. Penyempurnaan ini, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama

sekolah. UNDP kemudian memberi bobot kepada kedua indikator dalam dimensi pengetahuan, Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, ke empat indikator tersebut masih digunakan dalam penghitungan IPM karena dianggap cukup relevan.

Pada tahun 1995, UNDP kembali melakukan penyempurnaan metodologi penghitungan IPM. UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi (sekolah) kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan drastis metodologi penghitungan IPM, diganti dengan indikator lain yang lebih relevan. UNDP menyebut perubahan yang dilakukannya ini sebagai IPM metode baru. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Pada tahun 2011, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP mengubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita, yaitu dari tahun 2008 menjadi 2005.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penyempurnaan terhadap penghitungan metode baru. Kali ini, metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik diubah menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita diubah kembali menjadi 2008. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP ini, bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Alasan Perubahan Metodologi

https://empatlawangkab.bps.go.id

Perubahan metodologi penghitungan IPM oleh UNDP dilakukan berdasarkan alasan yang cukup rasional. Dasar perubahannya adalah suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan demikian, pemilihan metode dan variabel harus dilakukan secara tepat, sehingga indeks yang dihasilkan menjadi cukup relevan. Ada dua alasan pokok yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM.

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh, karena tidak dapat menggambarkan perubahan kualitas pendidikan.

Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang demikian itu akan menyebabkan indikator yang dibentuk menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu,

indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun, haruslah disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi yang ada di suatu wilayah. Di sisi lain, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan tingkat pendapatan atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Kondisi ini menjadi kontra produktif, karena konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan.

Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Oleh sebab itu, penggunaan rumus rata-rata aritmatika menjadi tidak relevan lagi dalam menghitung capaian pembangunan manusia.

Cakupan Perubahan Metodologi

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru, dengan beberapa perbedaan nyata dibandingkan metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua

hal mendasar tersebut, terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Tabel 2.1 Perbedaan Indikator IPM Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Indikator	
	Metode Lama	Metode Baru
(1)	(2)	(3)
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik

https://empatlawangkab.bps.go.id

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu harapan lama sekolah (HLS). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang sudah tidak lagi relevan. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks komposit, metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik. Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini, membuat indeks cederung sensitif terhadap ketimpangan. Dengan

kata lain, rata-rata geometrik menuntut adanya keseimbangan dari ketiga dimensi, sehingga capaian IPM menjadi optimal.

Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengaplikasikan penghitungan metode baru. Dengan melihat secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbarui penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- Angka harapan hidup saat lahir (Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS)
- Pengeluaran per kapita setahun disesuaikan (SUSENAS).

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita, karena ketidaktersediaan data pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, diproksi dengan pengeluaran per kapita setahun disesuaikan.

Indikator angka harapan hidup saat lahir sangat penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan data hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai. Betapapun juga, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk 2010.

Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini sehingga diganti dengan harapan lama sekolah. Sementara, indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun demikian, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti.

https://lempatlawangkab.bps.go.id

Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Adapun pada metode baru, cakupannya adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP.

Selain untuk keterbandingan dengan dunia internasional, alasan penting lain yang mendasari perubahan cakupan adalah pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas sudah tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, tetapi jumlahnya tidak akan signifikan. Dengan demikian, penduduk usia 25

tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya, karena cukup operasional dari sisi ketersedian data. Meskipun demikian, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli yang digunakan.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Tabel 2.2.

Perbedaan Indikator IPM Metode Lama dan Metode Baru BPS

Dimensi	Indikator	
	Metode Lama	Metode Baru
(1)	(2)	(3)
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas
Standar Hidup Layak	Pengeluaran per Kapita: 27 Komoditas Paritas Daya Beli	Pengeluaran per Kapita: 96 Komoditas Paritas Daya Beli
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
Perubahan Capaian	Reduksi *Shortfall* (RSF)	Pertumbuhan

Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Perubahan ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat, sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik.

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi shortfall. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan IPM.

https://lampatlamankab.bps.go.id

BAB III
METODOLOGI BARU IPM

https://kotapatikabupengkab.bps.go.id

https://empatlawangkab.bps.go.id

METODOLOGI BARU IPM

Pengertian IPM

Menurut UNDP dalam *Human Development Report* 1991, pembangunan manusia adalah suatu "proses meningkatkan pilihan yang lebih banyak bagi manusia untuk hidup (*a process of increasing people options*) atau proses peningkatan kemampuan manusia".

Proses tersebut dikonsentrasikan secara merata pada peningkatan formasi kemampuan manusia dengan cara investasi pada diri manusia. Selain itu, dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan manusia melalui penciptaan kerangka partisipasi untuk menghasilkan pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Adapun peningkatan pilihan bagi manusia mencakup tiga hal, yaitu menikmati kehidupan yang sehat dalam jangka waktu yang relatif lama, mempunyai pengetahuan, pekerjaan, dan pendapatan untuk mendukung kebutuhan hidup sesuai dengan standar yang memadai.

Dalam laporan yang sama, kemajuan pembangunan manusia menurut UNDP diukur dengan menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi kebutuhan dasar manusia, yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Gambar 3.1.

Diagram Penghitungan IPM Metode Baru di Indonesia

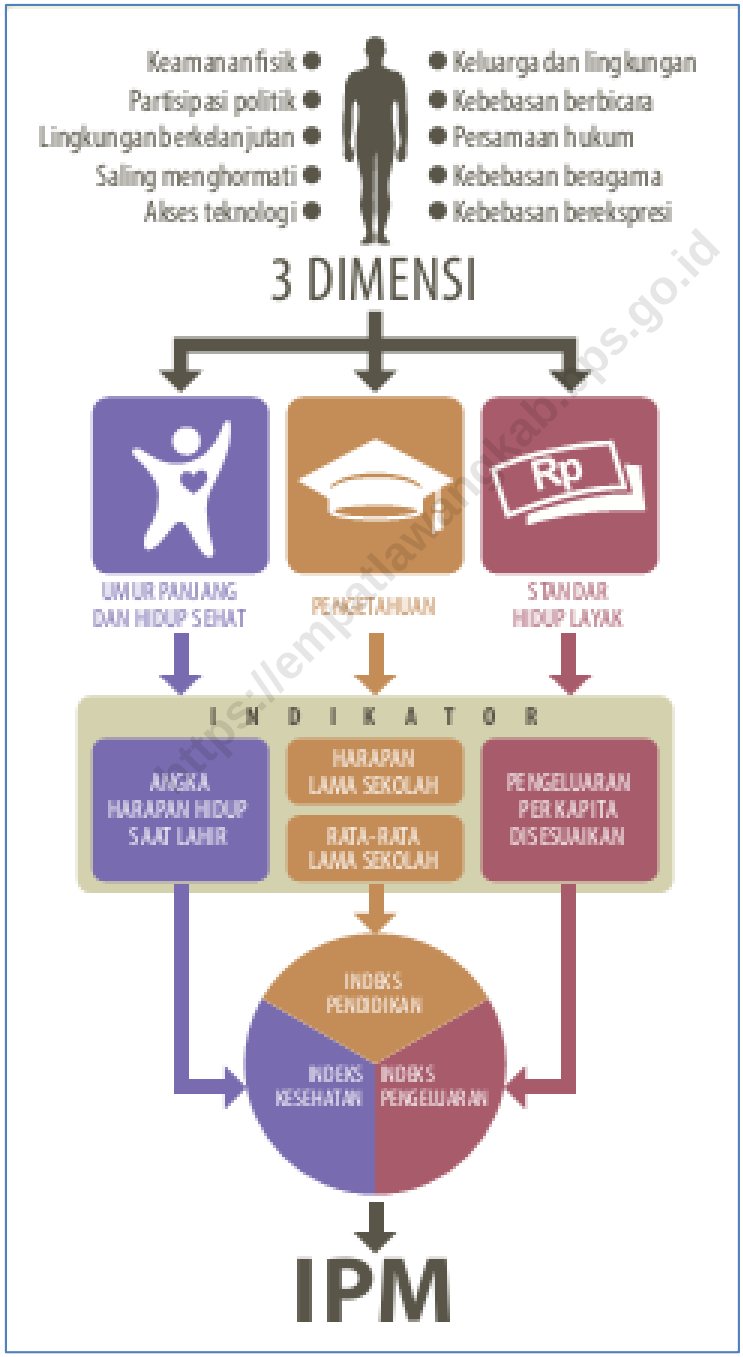

https://empatlawangkab.bps.go.id

IPM ini selanjutnya diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia, tentunya dengan melakukan berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan ketersediaan data di negara masing-masing.

Dalam konteks Indonesia, saat itu IPM merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan tiga dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat menggunakan ukuran harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan sebagai ukurannya adalah kombinasi dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita setahun disesuaikan sebagai ukuran.

Seiring dengan perubahan metodologi yang dilakukan oleh UNDP sejak tahun 2010 sampai tahun 2013, Indonesia mulai 2015 ini turut mengadopsi IPM Metode Baru. Komponen apa saja yang digunakan dalam menghitung IPM Metode Baru dapat dilihat pada Gambar 3.1. di atas.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Dimensi Umur Panjang dan Sehat

Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat. Namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) sebagai *proxy* nya.

Angka harapan hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Secara teori, semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin buruk kesehatannya maka umur kehidupan orang tersebut akan semakin pendek. Dengan demikian, AHH jelas dapat menggambarkan dimensi umur panjang dan sehat.

AHH dihitung melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*), dengan menggunakan data jumlah "Anak Kandung Lahir Hidup" dan "Anak Kandung Masih Hidup". Penghitungan angka harapan hidup ini menggunakan paket program *Mortpack* dengan metode *Trussel* dan model *West*. Pemilihan metode ini dilakukan, karena sesuai dengan historis data kependudukan dan kondisi umum Indonesia (Preston, 2004).

Melalui program *Mortpack,* dihasilkan estimasi AHH empat tahun sebelum tahun sensus atau survei. Untuk mendapatkan AHH pada tahun sensus atau survei, dilakukan *Fitting model* dari beberapa data historis. AHH sendiri dihitung dengan menggunakan data Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010.

Setelah mendapatkan AHH, selanjutnya dihitung Indeks AHH. Penghitungannya dilakukan dengan cara membandingkan angka tersebut dengan angka standar UNDP, yaitu angka harapan hidup minimum dan maksimum. Kedua angka standar tersebut masing-masing mecapai 20 tahun dan 85 tahun.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Dimensi Pengetahuan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan atau pencapaian pendidikan penduduk digunakan dua indikator, yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Informasi mengenai harapan lama sekolah, sangat penting karena dapat mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah.

Adapun rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin lama rata-rata tahun pendidikan penduduk di suatu wilayah, akan semakin tinggi pula mutu sumber daya manusianya.

Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, dengan sumber data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Adapun rumus untuk penghitungan HLS adalah sebagai berikut :

$$HLS_7 = \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i}{P_i}$$

https://empatlawangkab.bps.go.id

Dimana :

HLS = Harapan Lama Sekolah

E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah

P_i = Jumlah seluruh penduduk usia i

i = Usia (7, 8,…,n)

Setelah mendapatkan HLS, selanjutnya dihitung Indeks HLS. Indeks HLS diperoleh dengan membandingkan angka tersebut terhadap angka standar UNDP, dimana UNDP telah menetapkan HLS minimum dan maksimum, yaitu masing-masing adalah 0 tahun dan 18 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia

25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, juga untuk mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Sama sepert HLS, sumber data yang digunakan untuk menghitung RLS adalas Susenas.

RLS dihitung dengan mengolah dua variabel secara simultan, yaitu jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat/kelas pendidikan yang sedang/pernah diduduki. Penghitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, dihitung lama sekolah untuk masing-masing individu dengan menggunakan pola hubungan antar variabel. Tahap selanjutnya, dihitung rata-rata lama sekolah untuk keseluruhan individu.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Tabel 3.1.

Konversi Tahun Untuk Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Konversi Tahun
(1)	(2)
Tidak/Belum pernah sekolah	0
Tamat SD	6
Tamat SLTP	9
Tamat SLTA/SMU	12
Diploma I	13
Diploma II	14
Akademi / Diploma III	15
Diploma IV / Sarjana	16
Master (S2)	18
Doktor (S3)	21

Adapun formula untuk lama sekolah adalah :

Lama Sekolah = Konversi Tahun + Tingkat/Kelas Tertinggi yang pernah/sedang diduduki - 1

Dengan nilai konversi tahun untuk setiap jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 3.1. Adapun penghitungan RLS nya menggunakan rata-rata tertimbang, yaitu :

$$RLS = \frac{\sum_i f_i \; x \; L_i}{\sum_i f_i}$$

https://empatlawangkab.bps.go.id

Dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah

f_i = Frekuensi penduduk usia 25 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan ke-i

L_i = Lama sekolah untuk jenjang pendidikan ke-i.

i = Jenjang Pendidikan ke-i.

Indeks RLS diperoleh dengan membandingkan angka tersebut terhadap angka standar UNDP, yaitu RLS minimum dan maksimum, yang masing-masing adalah 0 tahun dan 15 tahun.

Indeks Pengetahuan

Untuk memperoleh indeks pengetahuan atau indeks pencapaian pendidikan, Indeks HLS dan Indeks RLS digabung menjadi satu dengan perbandingan yang sama, yaitu :

Indeks Pengetahuan = 1/2 Indeks HLS + 1/2 Indeks RLS

Apabila dikalikan 100, maka Indeks ini akan bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 100 (keadaan terbaik).

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk, sebagai dampak membaiknya ekonomi. Untuk pengukuran standar hidup layak di Indonesia, BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita setahun disesuaikan.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Dengan rata-rata pengeluaran per kapita setahun yang diperoleh dari Susenas, dibuat konstan dengan menggunakan tahun dasar 2012 (2012=100).

Perhitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas, dengan 66 komoditasnya merupakan komoditas makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao, yakni :

$$PPP_j = \prod_{i=1}^{m} \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Dimana :

PPP_j = Paritas daya beli di kabupaten/kota j

P_{ij} = Harga komoditas i di kabupaten/kota i

P_{ik} = Harga komoditas i di Jakarta Selatan

https://empatlawangkab.bps.go.id

Untuk menjamin keterbandingan yang standar, baik antar daerah maupun secara runtun waktu (tahun), beberapa tahapan prosedur yang harus ditempuh dalam penghitungan pengeluaran per kapita setahun disesuaikan disesuaikan adalah sebagai berikut :

1. Menghitung pengeluaran per kapita sebulan dari Susenas (=A)
2. Mengkonversi nilai A menjadi pengeluaran per kapita setahun dalam ribuan (=B).
3. Mendeflasikan nilai B dengan IHK (2012=100) yang sesuai (=C).
4. Menghitung Daya beli penduduk (*Purchasing Power Parity*, PPP/unit). Penghitungannya menggunakan Metode Rao, dengan data dasar adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai konsumsi 96 komoditi.
5. Membagi nilai C dengan PPP/unit (=D).

Adapun Batas maksimum dan minimum yang digunakan untuk penghitungan indeks pengeluaran per kapita setahun disesuaikan masing-masing adalah 26,6 juta rupiah dan 1 juta rupiah.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Penyusunan IPM Metode Baru

Untuk memperoleh angka IPM, dilakukan 2 (dua) tahapan penghitungan sebagai berikut : Tahap pertama, melakukan penghitungan indeks untuk setiap komponen pembentuk IPM, yaitu : Indeks AHH, Indeks Pengetahuan, dan Indeks Pendapatan.

Untuk setiap komponen, cara penghitungan indeksnya adalah sama, yaitu dengan membandingkan nilai masing-masing komponen dengan standar maksimum dan minimum yang telah ditetapkan (Tabel 3.2). Adapun tahap terakhir adalah menghitung angka IPM. Angka IPM sendiri merupakan rata-rata geometrik dari ketiga komponen pembentuk IPM.

Tabel 3.2.

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Metode Baru

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	20	Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah	18	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan	26.572.252	1.007.436	Standar BPS

https://lempatiawangkab.bps.go.id

Rumus yang digunakan untuk penghitungan Indeks AHH, Indeks HLS, dan Indeks RLS adalah sebagai berikut :

$$Indeks\ X_i = \frac{\left(X_i - X_{(i-\min)}\right)}{\left(X_{(i-maks)} - X_{(i-\min)}\right)}$$

Dimana :

X_i = Komponen IPM ke-i

$X_{(i\text{-}min)}$ = Nilai minimum komponen IPM ke-i

$X_{(i\text{-}maks)}$ = Nilai maksimum komponen IPM ke-i

Sementara rumus yang digunakan untuk penghitungan Indeks Pendapatan (Indeks Y) adalah sebagai berikut :

$$Indeks\ Y = \frac{\left[Ln(y) - Ln(y_{\min})\right]}{\left[Ln(y_{maks}) - Ln(y_{\min})\right]}$$

Dimana :

y = Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan

y_{min} = Nilai minimum komponen Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan

y_{makx} = Nilai maksimum komponen Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan

Adapun rumus yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah

$$IPM = \sqrt[3]{\text{Indeks AHH x Indeks Pengetahuan x Indeks Pendapatan}}$$

https://empatlawangkab.bps.go.id

Pencapaian dan Status Pembangunan Manusia

Sebagai indikator komposit, IPM mempunyai manfaat terbatas terutama bila disajikan tersendiri. Hal ini karena yang dapat ditunjukannya hanyalah status pembangunan manusia wilayah tersebut saja.

Namun bila dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah, posisi relatif suatu wilayah terhadap wilayah yang lain akan dapat diketahui. Selain itu, kemajuan atau pencapaian antar waktu di suatu wilayah dan perbandingannya dengan wilayah lain juga dapat diteliti.

Untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia dengan lebih teliti, dapat dilihat dari dua segi : Pertama, kenaikan IPM secara nilai absolut yang diukur dengan pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM adalah peningkatan nilai IPM dalam suatu periode (t+n) terhadap nilai IPM awal periode (t).

$$r = \frac{IPM_{t+1} - IPM_t}{IPM_t} x100$$

Kedua, adalah kenaikan status pembangunan manusia. Adapun klasifikasi statusnya telah ditentukan berdasarkan kategorisasi UNDP. Klasifikasi status tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status
(1)	(2)
< 60	Rendah
60 ≤ IPM < 70	Sedang
70 ≤ IPM < 80	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

https://empatlawangkab.bps.go.id

BAB IV
HASIL-HASIL IPM

https://empatlawangkab.bps.go.id

https://empatlawangkab.bps.go.id

HASIL-HASIL IPM

Pembangunan manusia sebagaimana direflekasikan dalam IPM merupakan isu strategis karena relevansinya terhadap sasaran pembangunan jangka panjang, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Manusia Indonesia yang berkualitas memiliki tiga ciri: *pertama*, sehat dan berumur panjang, *kedua* cerdas, kreatif, terampil, terdidik dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan *ketiga* mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak. Ketiga ciri manusia Indonesia yang berkualitas tersebut, terkait erat dengan ketiga parameter dalam IPM.

Pendekatan konseptual pembangunan manusia mencakup empat elemen pokok yaitu : *produktifitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.* Peningkatan kualitas hidup akan menjadi lebih luas dan terjamin jika kemampuan dasar yang mencakup hidup panjang dan sehat, berpengetahuan (serta menguasai IPTEK) dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (berdaya beli) dimiliki oleh penduduk. Produktivitas berarti manusia harus dapat meningkatkan produktivitasnya dalam artian ekonomi, yaitu untuk memperoleh pendapatan dan berpartisipasi dalam pasar kerja.

Pemerataan berarti semua mempunyai kesempatan yang sama berpartisipasi dalam seluruh kegiatan, termasuk ekonomi, sosial dan

https://empatlawangkab.bps.go.id

politik. Makna berkelanjutan adalah bahwa semua kegiatan dalam rangka pembangunan manusia dilakukan terus menerus, sedangkan pemberdayaan berarti semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Sehingga pada akhirnya, sasaran pembangunan manusia diprioritaskan pada tiga tujuan dasar, yaitu:

1. Usia hidup (*longevity*)
2. Pengetahuan (*knowledge*), dan
3. Standar hidup Layak (*decent living*).

Pilihan lainnya yang dianggap mendukung ketiga pilihan tersebut adalah kebebasan politik, dan penghomatan hak pribadi. Jadi jelas bahwa pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan Ekonomi dan peningkatan pendapatan, serta akumulasi modal. Dalam hal ini pembangunan manusia dan pemenuhan hak-hak azasi manusia model UNDP mempunyai kesamaan visi dan tujuan, yaitu untuk menjamin 'kebebasan', kemakmuran dan harga diri semua orang dimanapun berada.

https://lempatlawangkab.bps.go.id

IPM merupakan salah satu indikator komposit selain banyak ragam indikator lain yang dapat dibuat dari berbagai kegiatan pengumpulan data oleh BPS selama ini. Indikator itu sendiri merupakan petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dalam definisi lain, indikator dapat dikatakan sebagai alat pengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung.

Capaian Meningkat, Status Pembangunan Manusia Tetap

Perkembangan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Empat Lawang terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari naiknya angka IPM secara konsisten selama periode 2017-2022. Adapun besaran kenaikannya senilai 1,79 poin, yang setara dengan 0,51 poin per tahun (Gambar 4.1).

Gambar 4.1.

Nilai dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Empat Lawang, 2017-2021

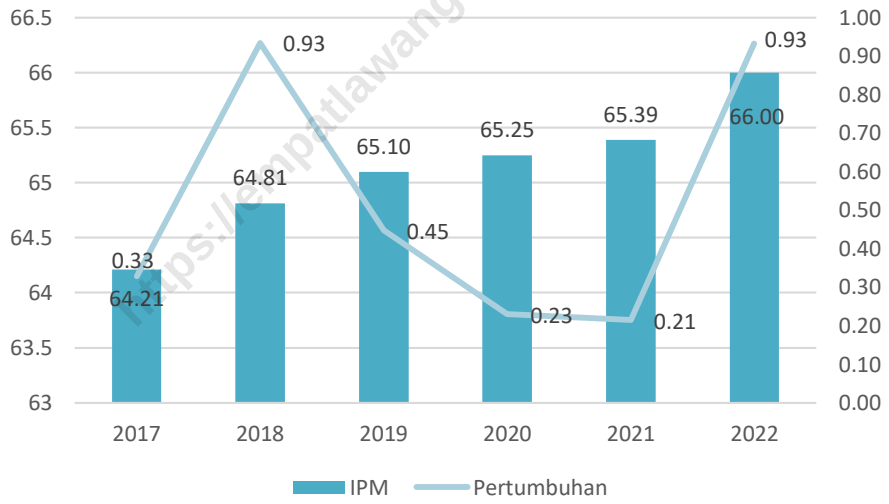

https://kempatlawangkab.bps.go.id

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2022

Angka IPM Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2022 mencapai 66,00. Ini berarti, pencapaian pembangunan manusianya masih sekitar 66 persen dari kondisi pembangunan manusia yang ideal (IPM ideal = 100). Angka tersebut juga menggambarkan bahwa IPM Kabupaten Empat Lawang masuk pada kategori sedang (60 ≤ IPM < 70) selama enam tahun terakhir.

Disisi lain keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya IPM, tetapi juga harus dilihat dari kecepatan peningkatannya. Untuk mengukur kecepatan peningkatan tersebut maka digunakan angka pertumbuhan IPM.

Kecepatan pertumbuhan IPM Kabupaten Empat Lawang selama periode 2017-2022 relatif berfluktuasi, bahkan melambat pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Capaian terbesar terjadi di tahun 2018 dan 2022 dimana pertumbuhan IPM Kabupaten Empat Lawang mengalami kenaikan dengan akselerasi sebesar 0,93 persen (Gambar 4.1). Kecepatan kenaikan IPM menurun tajam di tahun 2020 yaitu sebesar 0,23 persen dan di tahun 2021 bahkan hanya 0,21 persen. Artinya, meskipun nilai IPM Kabupaten Empat Lawang terus meningkat, namun kecepatannya sedikit melambat pada tiga tahun terakhir. Padahal percepatan pertumbuhan IPM membawa implikasi kepada semakin cepatnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai IPM yang ideal (IPM ideal = 100). Oleh karena itu, bagi pemangku kebijakan seyogyanya kondisi ini patut menjadi perhatian.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Selanjutnya perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Empat Lawang secara umum terus mengalami perbaikan. Angka IPM Kabupaten Empat Lawang secara konsisten selama periode 2017-2022 terus meningkat meskipun pada tahun 2020 sebagian besar Kabupaten/Kota di Sumsel mengalami penurunan (Tabel 4.1). Penyebab turunnya angka IPM di tahun tersebut diindikasikan karena efek pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 persoalan pandemi mulai dapat dikendalikan sehingga terjadi peningkatan kembali angka IPM di seluruh wilayah Provinsi Sumsel.

Meskipun IPM Kabupaten Empat Lawang terlihat terus mengalami kenaikan namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumsel posisi peringkat Kabupaten Empat Lawang hanya menempati urutan ke-14 atau terendah ke-4. IPM Empat Lawang hanya lebih baik dari Kabupaten OKU Selatan, PALI, dan Musi Rawas Utara.

Tabel 4.1.

Peringkat Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Sumsel, 2017-2022

https://empatlawangkabbps.go.id

Kabupaten / Kota	Nilai IPM						Peringkat	Pertum-buhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2021		
Ogan Komering Ulu	68,28	69,01	69,45	69,32	69,60	70,24	4	0,40
Ogan Komering Ilir	66,11	66,57	66,96	66,82	67,17	68,02	10	0,52
Muara Enim	67,63	68,28	68,88	68,74	68,86	69,43	7	0,17
Lahat	66,38	66,99	67,62	67,44	67,58	68,40	9	0,21
Musi Rawas	65,31	66,18	66,92	66,79	67,01	67,78	13	0,33
Musi Banyuasin	66,96	67,57	67,83	67,69	68,10	68,60	8	0,61
Banyuasin	65,85	66,40	66,90	66,74	67,13	67,93	12	0,58
Ogan Komering Ulu Selatan	63,96	64,84	65,43	65,30	65,34	65,87	15	0,06
Ogan Komering Ulu Timur	67,84	68,58	69,34	69,28	69,58	70,23	5	0,43
Ogan Ilir	65,63	66,43	67,22	67,06	67,17	67,96	11	0,16
Empat Lawang	**64,21**	**64,81**	**65,10**	**65,25**	**65,39**	**66,00**	**14**	**0,21**
Pali	62,58	63,49	64,33	64,70	64,88	65,75	16	0,28
Musi Rawas Utara	63,18	63,75	64,32	64,49	64,93	65,74	17	0,68
Palembang	77,22	77,89	78,44	78,33	78,72	79,47	1	0,50
Prabumulih	73,58	74,04	74,40	74,55	74,67	75,52	3	0,16
Pagar Alam	66,81	67,62	68,44	68,31	68,68	69,60	6	0,54
Lubuk Linggau	73,67	74,09	74,81	74,78	74,89	75,53	2	0,15

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2022

Hidup Semakin Sehat dan Lebih Lama

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kondisi kesehatan yang lebih baik. Dimensi umur panjang dan sehat ini, dalam pembangunan manusia diproksi dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH).

AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dengan demikian, AHH juga dapat menggambarkan derajat kesehatan yang telah dicapai oleh seseorang. Semakin tinggi derajat kesehatannya, maka kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Gambar 4.2.
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Empat Lawang,
2017-2022 (tahun)

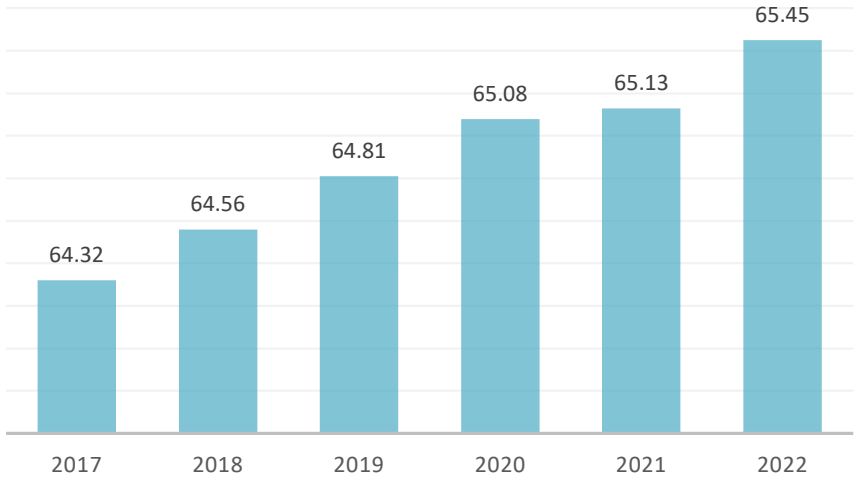

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2022

AHH yang merepresentasikan aspek kesehatan, terlihat terus meningkat selama kurun waktu 2017-2022 (Gambar 4.2). Meningkatnya AHH ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Empat Lawang sudah semakin membaik. Dengan kata lain, kehidupan masyarakatnya secara rata-rata menjadi lebih sehat, sehingga dapat hidup lebih lama.

AHH Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2017 mencapai 64,32 tahun. Artinya, setiap penduduk Kabupaten Empat Lawang yang dilahirkan pada tahun 2017 dapat diharapkan untuk bisa hidup sampai usia 64 tahun lebih. Lalu angka tersebut meningkat pada tahun 2022 yakni menjadi 65,45 atau terjadi kenaikan sebesar 1,13 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan taraf kesehatan dari masyarakat di Kabupaten Empat Lawang selama lima tahun terakhir relatif belum signifikan. Jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Sumsel secara umum yang mencapai 70,02 maka AHH Kabupaten Empat Lawang masih relatif tertinggal.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Peningkatan usia harapan hidup berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka sangatlah wajar jika pergerakan usia harapan hidup sangat lambat jika usia harapan hidup sudah cukup tinggi. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu memacu dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk merumuskan program di bidang kesehatan secara tepat, di masa yang akan datang dengan meningkatnya usia harapan hidup berakibat meningkat pula jumlah lansia. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan mereka pada masa yang akan datang.

Kualitas Pendidikan Meningkat, Peluang Terbuka Luas

Pendidikan dapat meningkatkan kualitas atau kemampuan diri seseorang sesuai dengan potensinya. Kemampuan ini kemudian digunakan untuk lebih memperhatikan kualitas hidupnya agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, dengan kemampuan diri yang meningkat, manusia yang berpendidikan akan berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Dengan kata lain, pendidikan menjadi sarana untuk memperluas peluang atau pilihan seseorang.

Begitu pentingnya peran pendidikan ini, sehingga fokus pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, juga untuk memperluas akses atau kesempatan dalam memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terakhir, adalah meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan dunia usaha.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Tabel 4.2.

Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Empat Lawang, 2021 (persen)

No	Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan	2021
1	≤SD/MI	43,18
2	SMP / MTS	24,58
3	SMA / SMK / Aliyah	24,79
4	DI/DII/DIII/ DIV/S1/S2/S3	7,45

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2022

Pada Tabel 4.2. menunjukkan pada tahun 2021 (data 2022 belum tersedia), persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki Pendidikan SD sederajat ke bawah mencapai 43,18 persen. Angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah perguruan tinggi hanya sebesar 7,45 persen. Sementara itu, penduduk 15 tahun ke atas yang berijazah SMP dan SMA sederajat masing-masing 24,58 dan 24,79 persen.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan semakin terbukanya kesempatan dalam pendidikan ini, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Keberhasilannya itu, jelas memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. Sementara tingkat keberhasilannya, dapat diketahui dari indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

https://empatlawangkab.bps.go.id

Peningkatan partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan, dapat dilihat dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk. Kedua indikator ini dalam pembangunan manusia mewakili aspek pengetahuan, yang keberhasilannya memerlukan dukungan kuat dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Angka HLS diambil dari data SUSENAS, yang dihitung dari data penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan

sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

RLS Kabupaten Empat Lawang selama periode 2017-2022 terus mengalami peningkatan (Gambar 4.3). Peningkatannya ini jelas menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Kabupaten Empat Lawang secara rata-rata telah meningkat. Dengan demikian, semakin terbuka peluang bagi penduduk Kabupaten Empat Lawang untuk lebih meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Gambar 4.3.

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Empat Lawang, 2017-2022 (tahun)

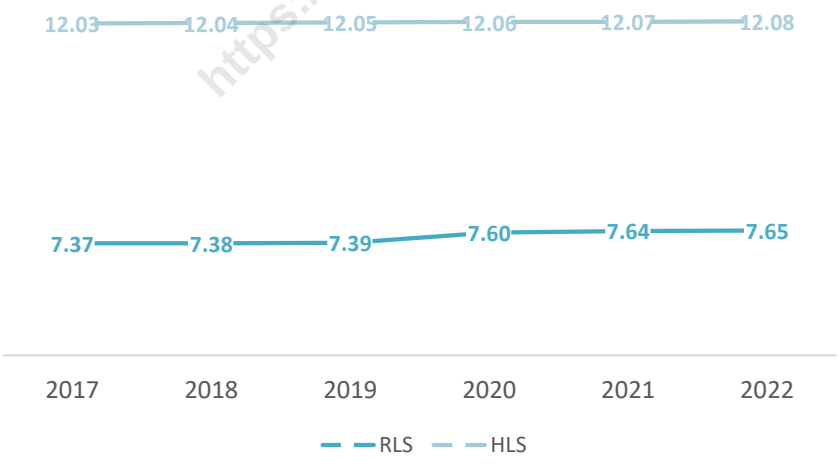

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2022

Betapapun juga, peningkatan kualitas pendidikan penduduk Kabupaten Empat Lawang terasa sangat lambat. Pada tahun 2017,

rata-rata penduduk Kabupaten Empat Lawang berusia 25 tahun ke atas, bersekolah hingga kelas 2 SMP (belum tamat). Enam tahun kemudian pada 2022, rata-rata lama sekolahnya masih sama yaitu sampai kelas 2 SMP (belum tamat).

Sementara itu, HLS Kabupaten Empat Lawang pada periode yang sama juga terus meningkat (Gambar 4.3). Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam hal sarana dan pra sarana pendidikan serta tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Adapun perbaikannya itu juga menjadi penanda bahwa sistem pendidikan di Kabupaten Empat Lawang selama ini sudah berjalan pada arah yang benar.

https://empatlawangkab.bps.go.id

HLS Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2022 mencapai 12,08 tahun. Berarti setiap penduduk Kabupaten Empat Lawang yang berusia 7 tahun pada tahun 2022 diharapkan dapat bersekolah selama 12 tahun lebih, atau sampai lulus SMA. Sementara pada saat yang bersamaan, angka HLS Sumsel yaitu sebesar 12,55 yang berarti secara umum penduduk Sumsel juga bersekolah sampai lulus SMA. Perlu diperhatikan bahwa meskipun pendidikan di Kabupaten Empat Lawang sudah berjalan pada arah yang benar, namun tetap harus diperbaiki agar dapat mengejar ketertinggalannya.

Standar Hidup Layak Semakin Meningkat

Dimensi terakhir yang menggambarkan kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dimensi ini direpresentasikan dengan menggunakan pengeluaran per kapita setahun yang disesuaikan.

Adapun pengeluaran sendiri jelas dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk. Selain itu berdasarkan data historis, pengeluaran menggambarkan kondisi perekonomian, sehingga cocok untuk digunakan sebagai proksi standar hidup layak.

Gambar 4.4.

Perkembangan Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan Penduduk Kabupaten Empat Lawang, 2017-2022 (ribu rupiah)

https://empatlawangkab.bps.go.id

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2022

Pengeluaran per kapita setahun disesuaikan Kabupaten Empat Lawang selama tahun 2017-2022 sebagaimana pada Gambar 4.4 terlihat terus meningkat. Namun peningkatannya ternyata relatif lambat karena dalam setahun rata-rata hanya bertambah 165,6 ribu rupiah. Bahkan pada tahun 2020 terjadi penurunan pengeluaran per kapita sebesar 244 ribu rupiah di Kabupaten Empat Lawang. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia.

Pemberlakuan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang ketat di tahun 2020 menyebabkan masyarakat Kabupaten Empat Lawang khususnya tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Hal ini menyebabkan penurunan konsumsi atau daya beli masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi peningkatan pengeluaran perkapita di Kabupaten Empat Lawang yakni menjadi 9,4 juta rupiah atau meningkat sebanyak 50 ribu dari tahun 2020. Pada tahun 2022 kembali meningkat bahkan cukup tinggi yaitu sebesar sebesar 438 ribu dibandingkan tahun 2021. Diharapkan peningkatan ini akan terus terjadi pada tahun-tahun selanjutnya seiring dengan membaiknya keadaan di Indonesia setelah diterjang pandemi covid-19.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten Empat Lawang Di Tengah Kabupaten/Kota Lainnya

Capaian pembangunan manusia Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2022 secara umum masih di peringkat 14 dari 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan menyusul posisi Kabupaten/Kota lainnya.

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 4.3, secara rata-rata terlihat bahwa seluruh komponen IPM Kabupaten Empat Lawang masih di bawah rata-rata Sumsel. Sementara terhadap Kabupaten tetangga seperti Lahat dan Musi Rawas, rata-rata seluruh komponen IPM juga masih berada dibawahnya. Oleh karena itu untuk mencapai kondisi

IPM ideal maka pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan setiap komponen tersebut.

Tabel 4.3.

IPM Kabupaten/Kota di Sumsel
Menurut Komponen, 2022

Kabupaten / Kota	Nilai IPM					Peringkat	Pertum-buhan
	AHH	HLS	RLS	Pengeluaran Perkapita	IPM		
Ogan Komering Ulu	68,55	12,84	8,73	10 499	70,24	4	0,40
Ogan Komering Ilir	69,01	11,89	7,07	11 251	68,02	10	0,52
Muara Enim	69,38	11,99	7,90	11 304	69,43	7	0,17
Lahat	66,52	12,43	8,53	10 296	68,4	9	0,21
Musi Rawas	68,62	12,21	7,55	10 107	67,78	13	0,33
Musi Banyuasin	69,19	12,3	7,65	10 453	68,6	8	0,61
Banyuasin	69,43	11,95	7,45	10 299	67,93	12	0,58
Ogan Komering Ulu Selatan	67,36	11,78	7,86	8 895	65,87	15	0,06
Ogan Komering Ulu Timur	69,48	12,46	7,80	11 759	70,23	5	0,43
Ogan Ilir	65,98	12,32	7,91	11 069	67,96	11	0,16
Empat Lawang	**65,45**	**12,08**	**7,65**	**9 838**	**66,00**	**14**	**0,21**
Pali	68,65	12,30	7,06	8 680	65,75	16	0,28
Musi Rawas Utara	66,08	11,61	7,26	10 283	65,74	17	0,68
Palembang	71,49	14,43	10,91	15 168	79,47	1	0,50
Prabumulih	70,87	13,03	10,2	13 106	75,52	3	0,16
Pagar Alam	67,29	13,24	9,41	9 330	69,60	6	0,54
Lubuk Linggau	69,82	13,39	9,91	13 832	75,53	2	0,15
Sumsel	70,32	12,55	8,37	11 109	70,90	-	0,94

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2022

https://empatlawangkab.bps.go.id

Komponen AHH sendiri merupakan komponen yang merepresentasikan dimensi umur panjang atau kesehatan, sedangkan komponen HLS dan RLS mewakili dimensi pengetahuan. Meskipun demikian, untuk mendorong peningkatan IPM maka hal yang harus dilakukan dalam jangka pendek dapat dimulai dengan mendorong pencapaian HLS nya.

Paling tidak ada dua alasan mengapa HLS yang lebih dulu dipilih. Pertama, rendahnya HLS pasti akan menyebabkan capaian RLS yang sudah cukup baik menjadi tertinggal. Hal ini karena HLS dihitung berdasarkan angka partisipasi sekolah (APS). Semakin tinggi APS, semakin tinggi pula HLS. Tingginya HLS ini, pada akhirnya akan meningkatkan capaian RLS pula.

Kedua karena APS itu lebih mudah ditingkatkan daripada meningkatkan AHH. Untuk meningkatkan APS, yang perlu dilakukan oleh pemerintah hanyalah melaksanakan program penambahan gedung sekolah atau kelas baru, merelokasi guru agar alokasinya menjadi lebih merata dan membuat regulasi yang membatasi atau menggratiskan sama sekali biaya masuk sekolah pertama kali. Tabel 4.4. di bawah menampilkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Empat Lawang.

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sampai 2021 (data 2022 belum tersedia) untuk APS usia SD dan SMP sudah terbilang tinggi yakni diatas 90 persen. Sementara itu, angka APS menurun signifikan untuk kelompok SMA yakni baru sebesar 71 persen pada 2021. Hal ini cukup sejalan dengan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang telah dibahas sebelumnya yang hanya sebesar 7,64.

https://empatlawangkab.bps.go.id

Dengan kata lain secara umum rata-rata penduduk Empat Lawang baru mengenyam pendidikan sampai level SMP.

Tabel 4.4

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Empat Lawang, 2019-2021
(persen)

Kelompok Umur (Tahun)	APS 2019	APS 2020	APS 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	100,00	99,96	99,58
13-15	98,76	98,90	98,70
16-18	70,31	71,39	71,11

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2022

https://empatlawangkab.bps.go.id

Sementara itu untuk meningkatkan komponen Angka Harapan Hidup (AHH) atau dimensi kesehatan menurut Hendrik L Blum ada empat faktor yang mempengaruhinya. Keempat faktor tersebut masing-masing adalah lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan (Gambar 4.5).

Berdasarkan bagan (Gambar 4.5) terlihat di antara keempat faktor tersebut yang paling besar peranannya dalam menentukan derajat kesehatan adalah lingkungan. Pada faktor ini peran masyarakat dalam membentuk lingkungan yang sehat sangatlah penting. Meski demikian pemerintah dapat ambil langkah misalnya dengan meningkatkan penyuluhan tentang sanitasi lingkungan dan pemukiman, termasuk tentang perilaku hidup sehat sebagai faktor terbesar kedua. Sementara pelayanan kesehatan adalah satu-satunya faktor yang

dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah peranannya berada pada posisi ketiga. Inilah yang menjadi penyebab mengapa menaikkan AHH dalam jangka pendek sangat sulit untuk dilakukan.

Gambar 4.5

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan Masyarakat
(Teori Derajat Kesehatan Hendrik L. Blum)

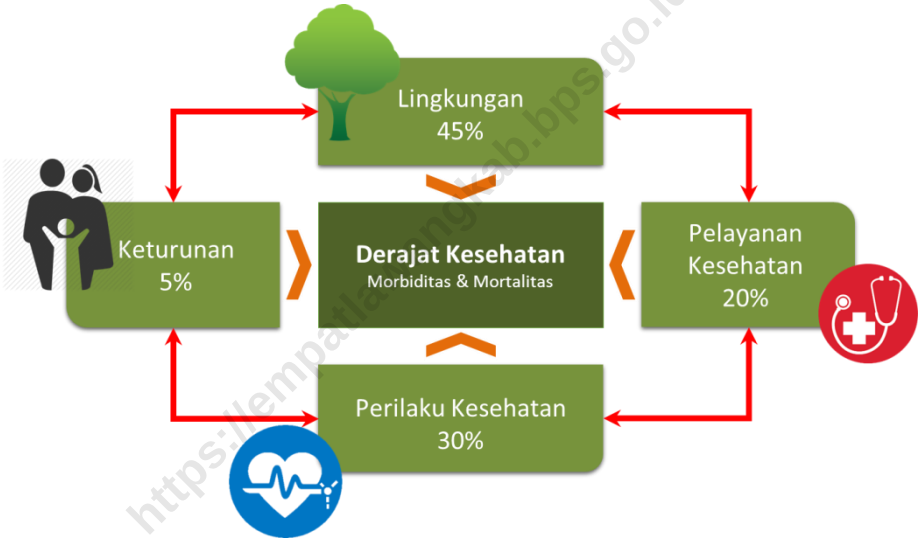

https://empatlawangkab.bps.go.id

BAB V
KESIMPULAN

https://lempuyangwangi.bps.go.id

https://empatlawangkab.bps.go.id

KESIMPULAN

- Angka IPM Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2022 yaitu 66,00 atau dengan kata lain masih sekitar 66 persen dari kondisi pembangunan manusia yang ideal (IPM ideal = 100).
- Status pembangunan manusia Kabupaten Empat Lawang tahun 2022 masih berada pada kategori "Sedang" (60 ≤ IPM < 70).
- Angka harapan hidup yang merepresentasikan dimensi kesehatan, pada tahun 2022 berada di angka 65,45 tahun, yang berarti setiap penduduk Kabupaten Empat Lawang yang dilahirkan pada tahun 2022 dapat diharapkan untuk hidup sampai usia 65 tahun lebih.
- Harapan lama sekolah pada tahun 2022 mencapai 12,08 tahun. Berarti, setiap penduduk Kabupaten Empat Lawang yang berusia 7 tahun pada tahun 2022 dapat diharapkan untuk bersekolah selama 12 tahun lebih atau tamat SMA.
- Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 mencapai 7,65 tahun. Berarti, setiap penduduk Kabupaten Empat Lawang yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 bersekolah hingga setara kelas 2 SMP (belum tamat).
- Pengeluaran per kapita setahun disesuaikan yang merepresentasikan standar hidup layak pada tahun 2022

https://lenpatlawangkab.bps.go.id

mengalami peningkatan. Besaran pengeluarannya sendiri mencapai 9,838 juta rupiah, naik 438 ribu dari tahun 2021.

- Capaian angka Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 di kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Selatan secara umum terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 angka tersebut sempat mengalami penurunan di beberapa Kabupaten/Kota. Hal ini tentu imbas dari banyaknya kebijakan pembatasan berskala besar yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran wabah covid-19.

https://empatlawangkab.bps.go.id

LAMPIRAN

https://lempatlaw.bpskab.bps.go.id

https://empatlawangkab.bps.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1. IPM Kabupaten Empat Lawang Menurut Komponen, 2017 - 2022

Tahun	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Penge-luaran (ribu rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	64,32	12,03	7,37	9 010
2018	64,56	12,04	7,38	9 450
2019	64,81	12,05	7,39	9 594
2020	65,08	12,06	7,60	9 350
2021	65,13	12,07	7,64	9 400
2022	65,45	12,08	7,65	9 838

https://empatlawangkab.bps.go.id

Lampiran 1. IPM Kabupaten Empat Lawang Menurut Komponen, 2017 - 2021

Lanjutan

Tahun	IPM			
	Nilai	Status	Peringkat	Pertum-buhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	64,21	Sedang	3	0,33
2018	64,81	Sedang	3	0,93
2019	65,10	Sedang	3	0,45
2020	65,25	Sedang	3	0,23
2021	65,39	Sedang	3	0,21
2022	66,00	Sedang	3	0,93

https://empatlawangkab.bps.go.id

Lampiran 3. IPM Sumsel Menurut Kabupaten/Kota, 2016 - 2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ogan Komering Ulu	68,28	69,01	69,45	69,32	69,60	70,24
Ogan Komering Ilir	66,11	66,57	66,96	66,82	67,17	68,02
Muara Enim	67,63	68,28	68,88	68,74	68,86	69,43
Lahat	66,38	66,99	67,62	67,44	67,58	68,40
Musi Rawas	65,31	66,18	66,92	66,79	67,01	67,78
Musi Banyuasin	66,96	67,57	67,83	67,69	68,10	68,60
Banyuasin	65,85	66,40	66,90	66,74	67,13	67,93
Ogan Komering Ulu Selatan	63,96	64,84	65,43	65,30	65,34	65,87
Ogan Komering Ulu Timur	67,84	68,58	69,34	69,28	69,58	70,23
Ogan Ilir	65,63	66,43	67,22	67,06	67,17	67,96
Empat Lawang	**64,21**	**64,81**	**65,10**	**65,25**	**65,39**	**66,00**
Pali	62,58	63,49	64,33	64,70	64,88	65,75
Musi Rawas Utara	63,18	63,75	64,32	64,49	64,93	65,74
Palembang	77,22	77,89	78,44	78,33	78,72	79,47
Prabumulih	73,58	74,04	74,40	74,55	74,67	75,52
Pagar Alam	66,81	67,62	68,44	68,31	68,68	69,60
Lubuk Linggau	73,67	74,09	74,81	74,78	74,89	75,53
Provinsi Sumsel	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24	70,90

https://empatlawangkab.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://empatlawangkab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN EMPAT LAWANG

Jl. Lintas Sumatera No. 35 Kelurahan Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp/Fax : 0702 7321262
Homepage : empatlawangkab.bps.go.id
E-mail : bps1611@mailhost.bps.go.i